



*Program Hibah
Integrated Participatory Development and
Management of Irrigation Program (IPDMIP)
TA 2021*

**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan**

Dasar Hukum dan Pengertian Hibah Daerah



Definisi

Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui **perjanjian**.

PP 2 Tahun 2012
Hibah Daerah



Ketentuan

Hibah Daerah merupakan salah satu **sumber penerimaan Daerah** untuk mendanai penyelenggaraan **urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah** dalam kerangka **hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah**.

PP 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuda



Pengelolaan

Pemerintah Daerah dapat meneruskan Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan **mekanisme pengelolaan keuangan daerah**

PMK 224/2017
Pengelolaan Hibah
Daerah

Prinsip-Prinsip Pemberian Hibah Kepada Pemda

01 Hibah diberikan untuk **mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemda** dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

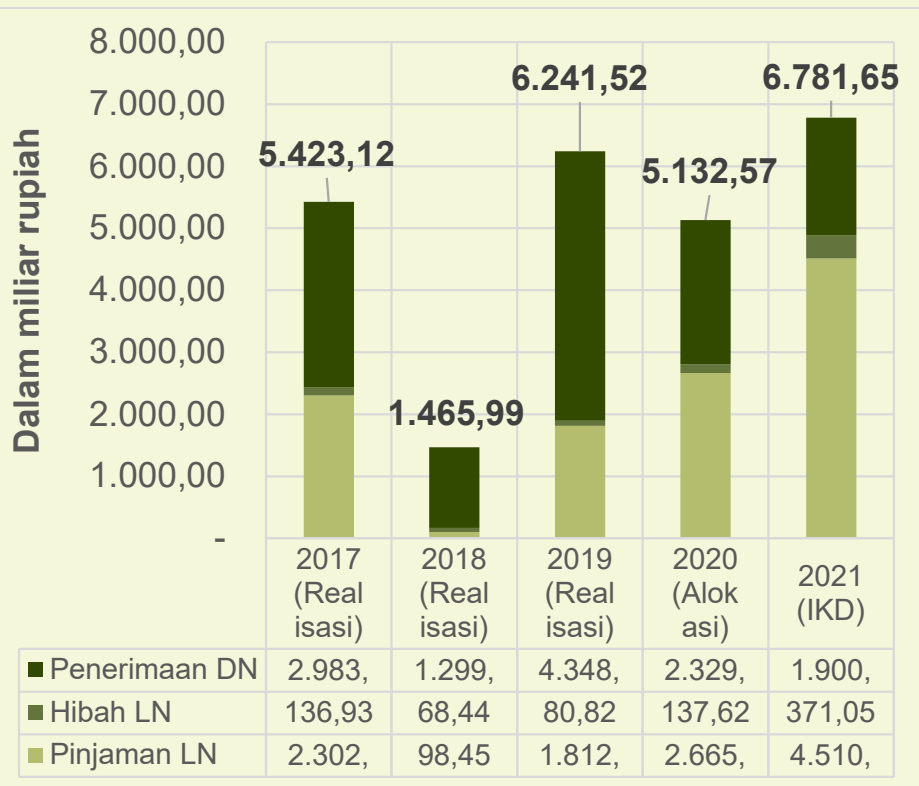
02 Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik

03 Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD

04 Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Kepala Daerah

05 Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja

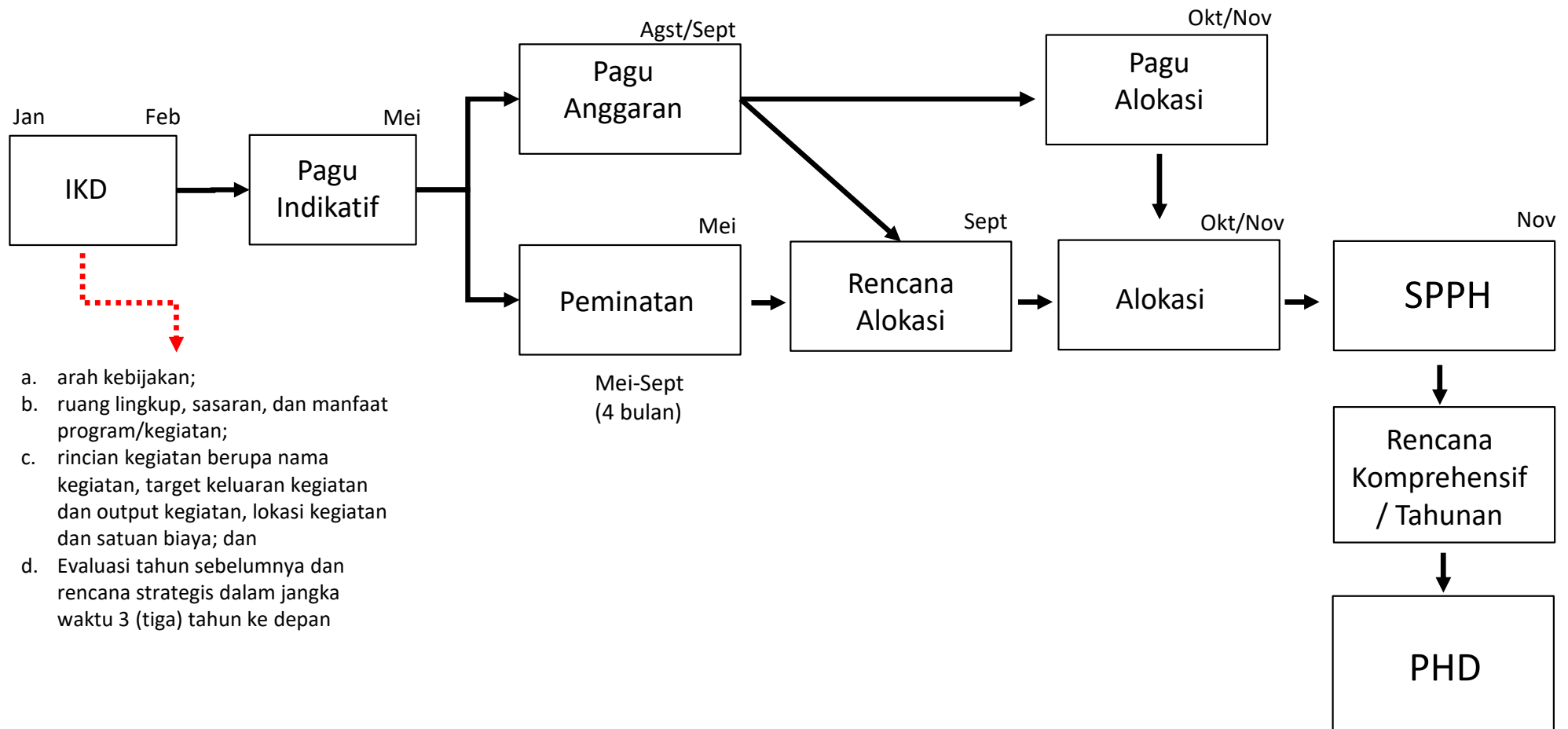
KEBIJAKAN HIBAH DAERAH TA 2021



- Mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, sanitasi, pertanian, dan jalan daerah
- Mendukung pemulihan ekonomi daerah melalui sektor dan daerah terdampak COVID-19
- Penguatan peran hibah dalam mendukung penanganan kondisi bencana alam dan nonalam serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian
- Percepatan pelaksanaan kegiatan PHLN untuk mendorong ketersediaan infrastruktur daerah
- Penguatan perencanaan hibah melalui sinkronisasi dengan TKDD dan dana lainnya yang berfokus prioritas nasional



PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN



- arah kebijakan;
- ruang lingkup, sasaran, dan manfaat program/kegiatan;
- rincian kegiatan berupa nama kegiatan, target keluaran kegiatan dan output kegiatan, lokasi kegiatan dan satuan biaya; dan
- Evaluasi tahun sebelumnya dan rencana strategis dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan



ALOKASI, SPPH, dan PHD

- 1) EA menyampaikan usulan alokasi kepada DJPK
- 2) Usulan alokasi dibahas DJPK bersama EA, dengan mempertimbangkan:
 - a. kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional;
 - b. sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;
 - c. kinerja dan kesiapan daerah; dan/atau
 - d. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hasil pembahasan dicantumkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh DJPK dan EA
- 4) DJPK menetapkan SPPH/SPPh (untuk hibah baru) dan menetapkan DIPA tahun berkenaan.

- 1) PHD untuk Hibah yang bersumber dari PDN berlaku untuk tahun anggaran berkenaan.
- 2) PHD untuk Hibah yang bersumber dari PHLN berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang disepakati dalam Perjanjian PHLN atau waktu yang disepakati oleh Pemerintah dan/atau pemberi PHLN.

Hibah Daerah IPDMIP

Rp3,3 Triliun

- IPDMIP merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.
- Sejalan dengan RPJMN 2005– 2025, kegiatan IPDMIP mendorong tercapainya ketahanan sumberdaya air dan ketahanan pangan.
- Peran masing-masing Institusi dalam pelaksanaan :
 1. National Steering Committee for Water Resources : Bappenas
 2. Executing Agency : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, KementerianPUPR
 3. Implementing Agency :
 - ✓ Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kemendagri
 - ✓ Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PertanianKementerian Pertanian
 - ✓ 88 Pemerintah Daerah Penerima Hibah
 4. KPA Hibah : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 5. PPA Hibah : Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko
- **Kegiatan direncanakan tahun 2018-2021 dan penarikan dana dilakukan sampai dengan Juni 2022, Khusus untuk IFAD sampai dengan Maret 2023**



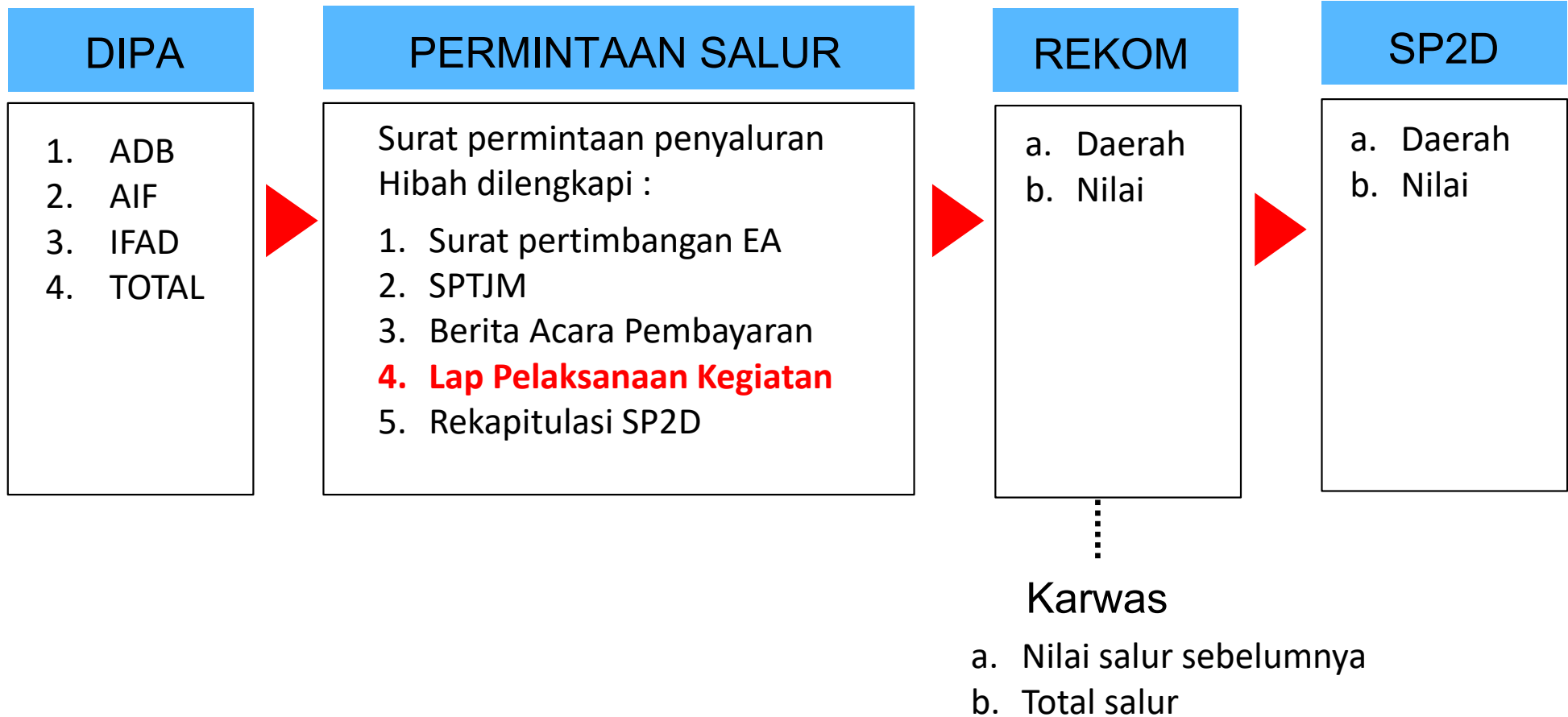
MEKANISME PENYALURAN HIBAH DAERAH

1. Penyaluran hibah dilakukan berdasarkan *output base* atau *performance base*;
2. Pemda melaksanakan kegiatan terlebih dahulu dengan dana APBD, kemudian dimintakan *reimbursement* ke DJPK;

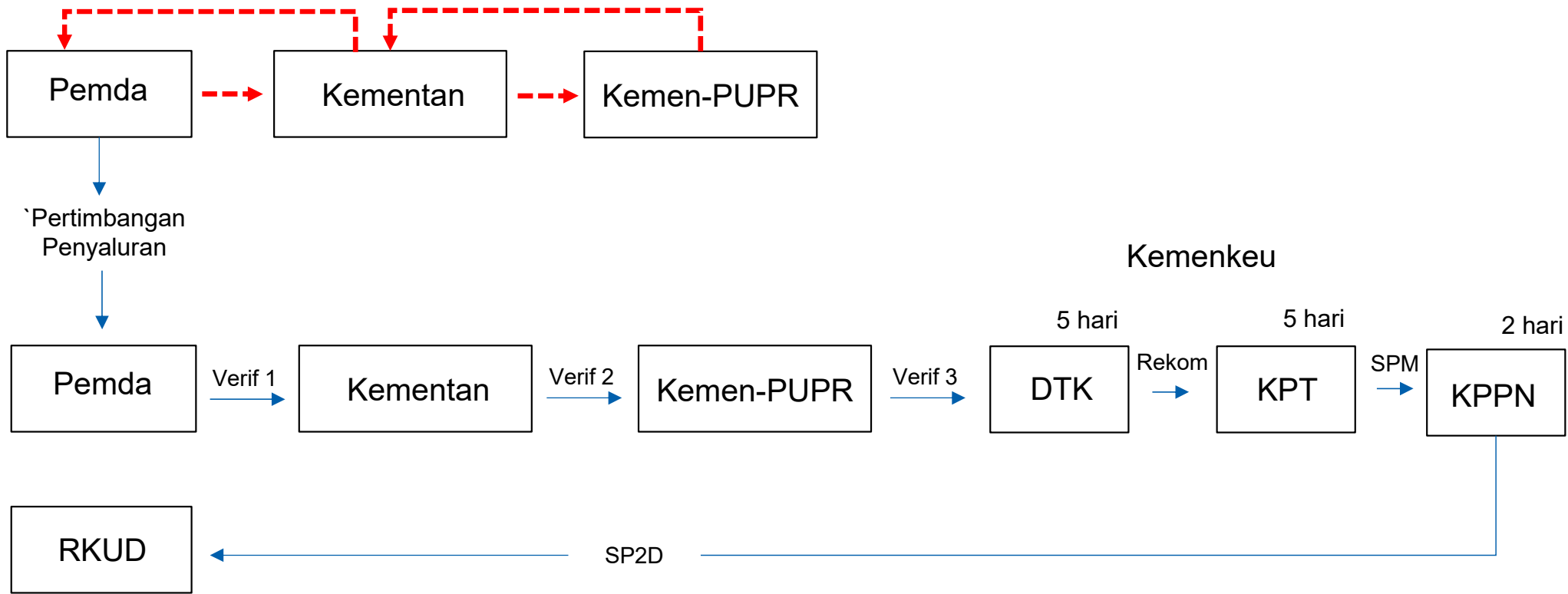




DOKUMEN PENYALURAN

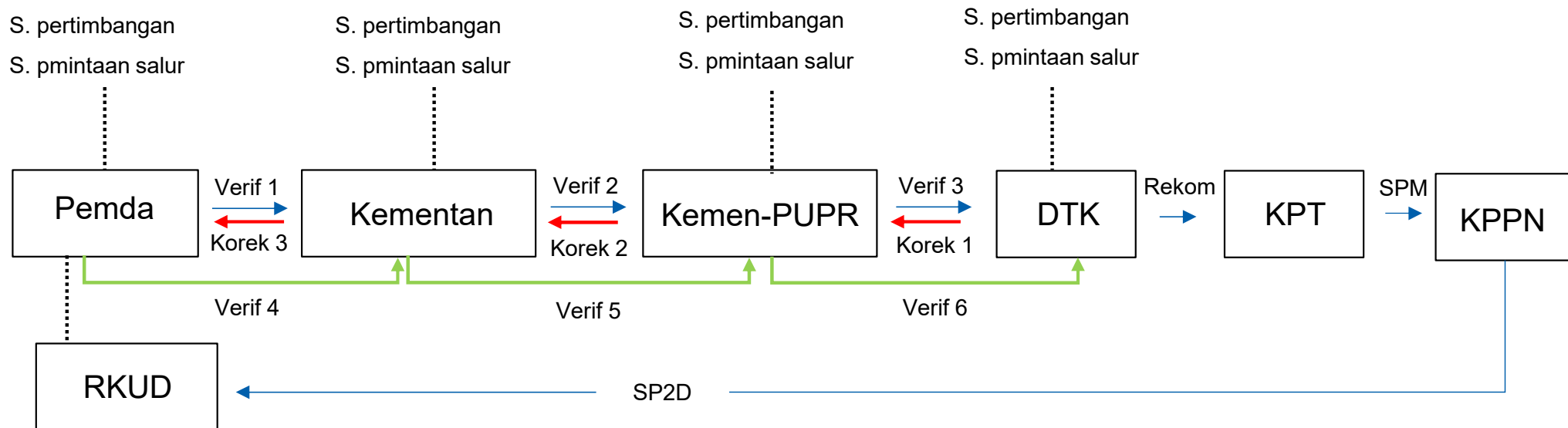


PROSES SURAT PERTIMBANGAN DAN PENYALURAN





PROSES SAAT INI



1. Tahapan proses tidak sesuai
2. Kesalahan data :
 - S pertimbangan : tgl dan nilai
 - PHD : no, tgl, nilai
 - Nilai DIPA
 - No.rek RKUD
3. Isu kelengkapan : ttd dan cap
4. Pagu DIPA terlampaui



1. Waktu koreksi yang Panjang
2. Informasi posisi dokumen
3. Realisasi rendah
4. Koordinasi Kementan dan KemenPUPR
5. Koordinasi BPKAD tidak optimal

Pelaksanaan IPDMIP

- Kinerja Realisasi Penyerapan IPDMIP belum terlalu baik, dimana rata-rata penyerapan dari tahun 2018 s.d. 2020 adalah 54,14%. Sementara itu Kinerja penyerapan TA 2021 sampai dengan rekomendasi ke 21 adalah 44,95%.
- Jumlah penyampaian dokumen permintaan penyaluran oleh pemerintah daerah yang dikembalikan karena terdapat kesalahan masih cukup banyak. Perbaikan tersebut juga seringkali memerlukan waktu yang cukup lama untuk kembali ke DJPK.
- Waktu permintaan salur yang kurang cepat, dimana hingga masuk semester II TA 2021 masih terdapat permintaan salur atas luncuran TA 2020 yang seharusnya dapat diajukan secara lebih cepat.



KINERJA HIBAH IPDMIP

dalam miliar rupiah

SISA HIBAH IPDMIP 2018-2021

	ADB & AIF	IFAD	Total
Pagu IPDMIP (PHD)	2,787.10	538.60	3,325.70
Realisasi 2018-2021	824.73	138.60	963.33
	29.59%	25.73%	28.97%
Sisa Pagu IPDMIP	1,962.37	400.00	2,362.37
	70.41%	74.27%	71.03%

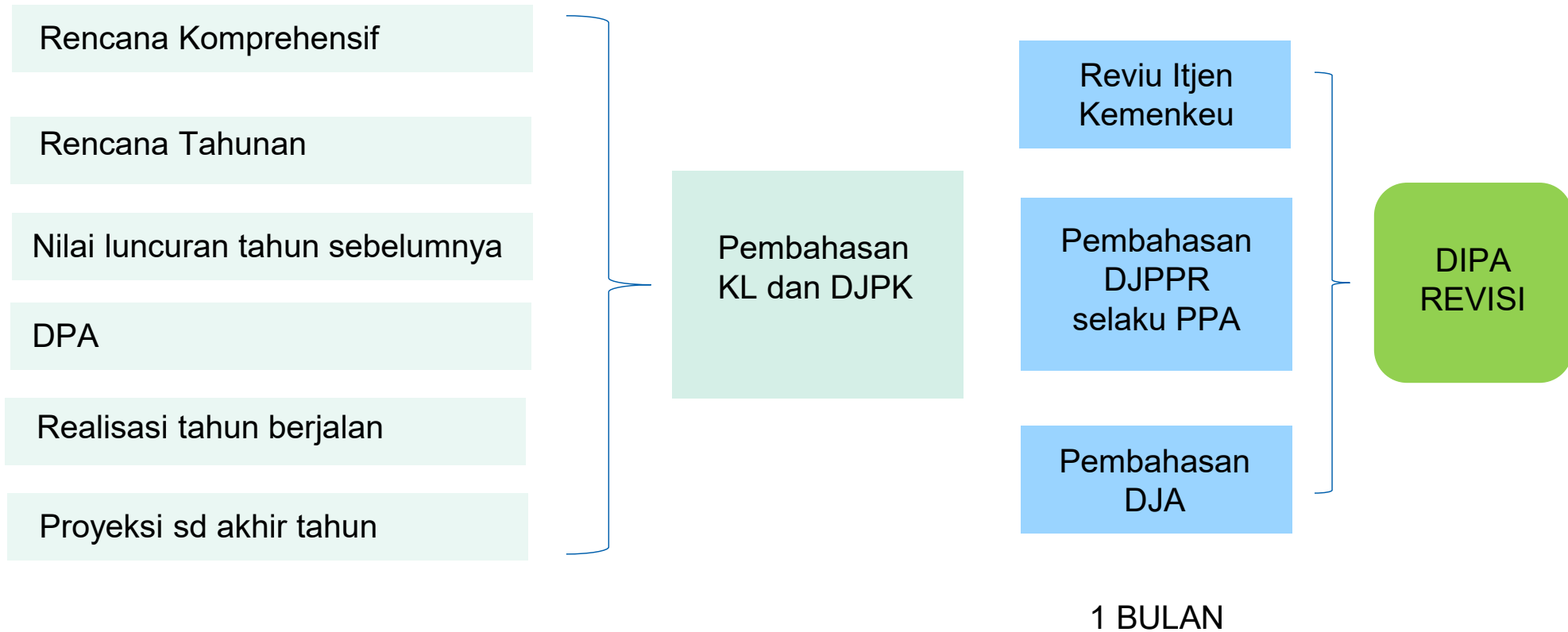
- Sampai dengan tahun ke-4 pelaksanaan Hibah IPDMIP, masih terdapat 42 daerah dengan kinerja penyerapan dibawah 25% dari Pagu DIPA

Tahun	Pagu			Realisasi					
	ADB-AIF	IFAD	Total	ADB-AIF	%	IFAD	%	Total	%
2018	30.53	77.23	107.76	22.52	73.76%	7.01	9.08%	29.53	27.40%
2019	210.33	41.79	252.12	139.60	66.37%	40.47	96.84%	180.07	71.42%
2020	562.78	57.04	619.82	349.41	62.09%	44.72	78.40%	394.13	63.59%
2021	639.19	160.81	800.00	313.21	49.00%	46.41	28.86%	359.61	44.95%
2022	592.26	144.73	736.99						

- Kinerja Realisasi Penyerapan IPDMIP rata-rata tahun 2018-2020 adalah 54,14%.
- Kinerja penyerapan TA 2021 sampai dengan rekomendasi ke 21 adalah 44,95% **dengan 48 daerah memiliki kinerja penyerapan di bawah 50%.**



REVISI ALOKASI





Gambaran Usulan Perubahan Pagu Hibah IPDMIP TA 2021

ADB

Pagu DIPA:

532.692.173.000

Pagu Perubahan:

698.285.216.000

Jumlah Daerah dengan
Pagu Meningkatkan:

58

Jumlah Daerah dengan
Pagu Menurun:

28

AIF

Pagu DIPA:

106.497.715.000

Pagu Perubahan:

139.324.581.000

Jumlah Daerah dengan
Pagu Meningkatkan:

58

Jumlah Daerah dengan
Pagu Menurun:

28

IFAD

Pagu DIPA:

160.810.112.000

Pagu Perubahan:

138.544.505.000

Jumlah Daerah dengan
Pagu Meningkatkan:

32

Jumlah Daerah dengan
Pagu Menurun:

53



UPAYA PENINGKATAN PENYERAPAN ANGGARAN IPDMIP

1. Peningkatan koordinasi antar daerah, Kementan, dan KemenPUPR
2. Peningkatan akurasi pelaporan
3. Penguatan perencanaan reimbursemen
4. Monev secara periodik
5. Digital dokumen
6. Peningkatan koordinasi di daerah (OGO, Distan dan BPKAD)
7. Penguatan kapasitas pengelola IPDMIP



Langkah- langkah akhir kegiatan

01

Dokumen permintaan penggantian dana hibah IFAD yang sudah final untuk Tahun Anggaran 2021 diterima oleh NPIU dari PIU Provinsi dan Kabupaten paling lambat tanggal **2021**.

02

Dokumen permintaan penggantian dana hibah (ADB + AIF + IFAD) yang sudah final untuk Tahun Anggaran 2021 diterima oleh NPMU dari PIU Provinsi dan Kabupaten paling lambat tanggal **2021**.

03

Dokumen permintaan penggantian dana Hibah (ADB + AIF + IFAD) yang diterima setelah tanggal dalam butir 1 diatas, akan kami perlakukan **sebagai luncuran**, dan akan menjadi beban Tahun Anggaran 2022.

04

Dokumen pengajuan permintaan penggantian dana hibah (ADB + AIF + IFAD) final untuk Tahun Anggaran 2021 diterima oleh DJPK dari NPMU paling lambat tanggal **5 Desember 2021**.



Langkah- langkah akhir Program

01

PIU Provinsi dan Kabupaten harus mengirimkan informasi kepada NPMU terkait nilai permintaan penggantian dana Hibah (ADB + AIF + IFAD) nilai reimburse yang akan di luncurkan ke Tahun Anggaran 2022 paling lambat pada akhir Januari 2022.

02

Dokumen permintaan penggantian dana hibah (ADB + AIF) luncuran TA 2021 dan Murni Tahun Anggaran 2022 diterima oleh NPMU dari PIU Provinsi dan Kabupaten paling lambat tanggal **30 April 2022**.

03

Revisi DIPA?

04

Dokumen paling lambat diterima oleh NPMU dan DJPK?

A landscape photograph of a green field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm glow over the scene. The field is lush and green, with some white flowers in the foreground. The sky is a mix of orange and yellow. On the right side of the image, there is a dark green rectangular overlay that contains the text 'Terima Kasih'.

Terima Kasih



No.	Uraian Persyaratan Salur Hibah Daerah	No. Surat	Tgl Surat	Pejabat ttd		Cap Instansi	Meterai	Nilai Uang (Rp)
				Nama	Jabatan			
1	Surat Permintaan Verifikasi	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		nilai hibah yang diminta
2	Surat rekomendasi dari K/L	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		nilai hibah yang direkomendasikan
3	Surat Permintaan Penyaluran							
	a. Dana ADB	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		nilai hibah yang diminta - ADB
	b. Dana AIF	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		nilai hibah yang diminta - AIF
	c. Dana IFAD	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		nilai hibah yang diminta - IFAD
4	Surat Kuasa untuk Permintaan penyaluran*	no surat	tgl surat	nama yang diberi kuasa	jabatan	ok/tidak	ok/tidak	
5	SPTJM							
	a. Dana ADB	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak	ok/tidak	nilai hibah yang diminta - ADB
	b. Dana AIF	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak	ok/tidak	nilai hibah yang diminta - AIF
	c. Dana IFAD	no surat	tgl surat	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak	ok/tidak	nilai hibah yang diminta - IFAD
6	BAP (2 rangkap)			nama bendahara umum daerah	Bendahara Umum Daerah	ok/tidak	ok/tidak	
	No. DIPA	999.02.1.985251/2020	tgl DIPA					
	Nilai Hibah (bagian DIPA) <i>(diisi dengan nilai pagu masing2 daerah, bukan pagu total)</i>							
	a. Dana ADB							nilai pagu RKA - ADB
	b. Dana AIF							nilai pagu RKA - AIF
	c. Dana IFAD							nilai pagu RKA - IFAD
	PHD/PPH							
	a. Dana ADB	no PHD	tgl PHD					nilai hibah dalam PHD - ADB
	b. Dana AIF	no PHD	tgl PHD					nilai hibah dalam PHD - AIF
	c. Dana IFAD	no PHD	tgl PHD					nilai hibah dalam PHD - IFAD
	Bank dan Nomor RKUD	diisi nama bank	diisi no rekening					
	Nama PPK			IRWAN HERCULES SITORUS	PPK DJPK			
	Nilai realisasi sebelum tahap berkenaan**							realisasi hibah yang sudah dimintakan
	Nilai Penyaluran Tahap berkenaan***							
	a. Dana ADB							nilai hibah yang diminta - ADB
	b. Dana AIF							nilai hibah yang diminta - AIF
	c. Dana IFAD							nilai hibah yang diminta - IFAD
7	Laporan Triwulanan****							
	Laporan Tw I		tgl laporan	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		total laporan tw 1
	Laporan Tw II		tgl laporan	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		total laporan tw 2
	Laporan Tw III		tgl laporan	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		total laporan tw 3
	Laporan Tw IV		tgl laporan	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		total laporan tw 4
8	Rekapitulasi SP2D							
	a. Dana ADB		tgl rekap SP2D	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		total sp2d - ADB
	b. Dana AIF		tgl rekap SP2D	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		total sp2d - AIF
	c. Dana IFAD		tgl rekap SP2D	nama penandatanganan	jabatan	ok/tidak		total sp2d - IFAD
9	RKUD			nama RKUD	nomor RKUD			
	Copy Rek Koran	ada/tidak						

Perkembangan IPDMIP TA 2021 s.d. Rekomendasi ke 21 (1)

Rekomendasi ke-	ADB	AIF	IFAD	Total	Keterangan
1 - 10	151.578.112.137	29.956.914.909	20.082.446.752	201.617.473.798	Sudah SP2D
11-18	93.631.000.342	18.730.694.534	9.917.062.419	122.278.757.295	Sudah SP2D
19	2.041.985.491	408.495.117	3.380.882.669	5.831.363.277	Sudah SP2D
20	3.740.863.949	748.352.359	10.580.010.557	15.069.226.865	Dalam Proses
21	10.307.713.454	2.062.037.480	2.445.825.915	14.815.576.849	Dalam Proses
Total	261.299.675.373	51.906.494.399	46.406.228.312	359.612.398.084	

SISA PAGU IPDMIP TA 2021				
	ADB	IFAD	AIF	Total
Pagu IPDMIP (DIPA)	532,692,173,000	106,497,715,000	160,810,112,000	800,000,000,000
Realisasi	261.299.675.373	51.906.494.399	46.406.228.312	359.612.398.084
Sisa Pagu IPDMIP	271,392,497,627	54,591,220,601	114,403,883,688	440,387,601,916

Persentase Realisasi IPDMIP secara keseluruhan adalah 44,95%, dengan persentase ADB sebesar 49,05%, AIF sebesar 48,74% dan IFAD sebesar 28,86%



No	Daerah	REALISASI 2018-2021 & PERSENTASE TERHADAP PHD			
		ADB	%	AIF	%
1	Kabupaten Asahan	7,397,984,324	85.23%	1,479,951,982	85.05%
2	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	13,570,395,801	83.92%	2,714,730,565	84.05%
3	Kabupaten Sidenreng Rappang	19,857,227,153	79.05%	3,972,398,616	79.13%
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	10,494,819,703	76.49%	2,099,467,712	76.62%
5	Kabupaten Empat Lawang	14,407,431,063	70.90%	2,882,177,798	70.99%
6	Provinsi Nusa Tenggara Timur	17,356,901,904	69.90%	3,472,213,549	69.86%
7	Provinsi Sulawesi Tengah	28,819,447,146	69.18%	5,765,272,820	69.21%
8	Kabupaten Barito Kuala	10,879,684,018	67.12%	2,176,459,050	67.17%
9	Kabupaten Pinrang	9,180,062,507	63.75%	1,836,453,161	63.77%
10	Kabupaten Sukabumi	19,533,575,998	61.74%	3,907,652,849	61.73%
11	Kabupaten Ngawi	15,069,781,699	55.16%	3,014,679,719	55.21%
12	Kabupaten Pesisir Selatan	18,914,068,607	52.48%	3,783,721,634	52.48%
13	Kabupaten Madiun	8,148,968,979	50.99%	1,630,184,961	50.94%
14	Kabupaten Mesuji	5,083,541,533	50.08%	1,016,952,328	50.10%
15	Provinsi Sumatera Selatan	40,188,781,564	50.01%	8,039,685,452	50.03%
16	Kabupaten Cilacap	15,419,687,649	49.11%	3,084,677,705	49.12%
17	Provinsi Sumatera Utara	23,230,126,614	48.84%	4,647,140,414	48.87%
18	Provinsi Sulawesi Utara	28,544,634,193	48.10%	5,710,297,036	48.11%
19	Provinsi Kalimantan Selatan	18,253,213,527	47.19%	3,651,518,894	47.18%
20	Kabupaten Lahat	8,656,901,873	45.51%	1,731,795,924	45.57%

No.	Daerah	REALISASI 2018-2021 & PERSENTASE TERHADAP PHD	
		IFAD	%
1	Kabupaten Kayong Utara	3,146,726,539	79.46%
2	Kabupaten Ngawi	5,644,876,293	58.68%
3	Kabupaten Musi Rawas	2,059,855,340	58.02%
4	Kabupaten Poso	2,647,241,000	56.93%
5	Provinsi Sulawesi Tengah	3,136,897,475	55.92%
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1,953,482,488	54.87%
7	Kabupaten Ketapang	2,017,611,664	52.82%
8	Kabupaten Manggarai Timur	2,077,388,000	51.55%
9	Kabupaten Empat Lawang	2,257,313,573	51.42%
10	Kabupaten Banyumas	2,534,880,070	51.31%
11	Kabupaten Pati	5,036,882,053	50.98%
12	Kabupaten Aceh Timur	2,322,881,000	49.32%
13	Kabupaten Pesawaran	2,842,375,414	46.75%
14	Kabupaten Sukabumi	5,154,141,200	44.51%
15	Kabupaten Bima	3,480,800,800	41.64%
16	Kabupaten Kubu Raya	1,841,380,131	40.92%
17	Kabupaten Sidenreng Rappang	2,175,725,300	40.74%
18	Kabupaten Lumajang	2,993,949,500	40.03%
19	Kabupaten Indramayu	2,492,194,921	38.70%
20	Kabupaten Wajo	2,526,339,205	38.63%



No	Nama Daerah	ADB		AIF		IFAD		Total	
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	13.570.395.801	83,92%	2.714.730.565	84,05%	1.953.482.488	54,87%	18.238.608.854	79,44%
2	Kabupaten Asahan	7.397.984.324	85,23%	1.479.951.982	85,05%	698.650.668	36,77%	9.576.586.974	77,73%
3	Kabupaten Sidenreng Rappang	19.857.227.153	79,05%	3.972.398.616	79,13%	2.175.725.300	40,74%	26.005.351.069	73,30%
4	Kabupaten Empat Lawang	14.407.431.063	70,90%	2.882.177.798	70,99%	2.257.313.573	51,42%	19.546.922.434	67,94%
5	Provinsi Sulawesi Tengah	28.819.447.146	69,18%	5.765.272.820	69,21%	3.136.897.475	55,92%	37.721.617.441	67,84%
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	10.494.819.703	76,49%	2.099.467.712	76,62%	1.485.381.442	29,24%	14.079.668.857	65,37%
7	Provinsi Nusa Tenggara Timur	17.356.901.904	69,90%	3.472.213.549	69,86%	605.454.400	10,99%	21.434.569.853	60,70%
8	Kabupaten Sukabumi	19.533.575.998	61,74%	3.907.652.849	61,73%	5.154.141.200	44,51%	28.595.370.047	57,71%
9	Kabupaten Pinrang	9.180.062.507	63,75%	1.836.453.161	63,77%	1.625.782.475	34,52%	12.642.298.143	57,49%
10	Kabupaten Barito Kuala	10.879.684.018	67,12%	2.176.459.050	67,17%	1.775.269.228	27,70%	14.831.412.296	57,35%
11	Kabupaten Ngawi	15.069.781.699	55,16%	3.014.679.719	55,21%	5.644.876.293	58,68%	23.729.337.711	55,97%
12	Kabupaten Pesisir Selatan	18.914.068.607	52,48%	3.783.721.634	52,48%	2.379.660.762	30,51%	25.077.451.003	49,12%
13	Provinsi Sumatera Selatan	40.188.781.564	50,01%	8.039.685.452	50,03%	2.322.025.204	28,60%	50.550.492.220	48,35%
14	Provinsi Sulawesi Utara	28.544.634.193	48,10%	5.710.297.036	48,11%	627.264.550	12,45%	34.882.195.779	45,74%
15	Provinsi Sumatera Utara	23.230.126.614	48,84%	4.647.140.414	48,87%	544.454.273	10,53%	28.421.721.301	45,66%
16	Kabupaten Aceh Timur	9.076.191.694	44,49%	1.815.674.013	44,50%	2.322.881.000	49,32%	13.214.746.707	45,27%
17	Kabupaten Cilacap	15.419.687.649	49,11%	3.084.677.705	49,12%	1.750.634.264	24,01%	20.254.999.618	45,04%
18	Kabupaten Mesuji	5.083.541.533	50,08%	1.016.952.328	50,10%	351.174.827	14,88%	6.451.668.688	44,37%
19	Kabupaten Kayong Utara	6.086.825.684	37,25%	1.217.657.317	37,24%	3.146.726.539	79,46%	10.451.209.540	44,34%
20	Kabupaten Madiun	8.148.968.979	50,99%	1.630.184.961	50,94%	1.984.683.750	26,60%	11.763.837.690	44,16%



dalam juta Rupiah

No	Nama Daerah	Semula	Menjadi	%
1	Provinsi Aceh	2.299	1.083	(52,91)
2	Provinsi Sumatera Utara	1.479	817	(44,77)
3	Provinsi Sumatera Barat	2.940	3.657	24,39
4	Provinsi Sumatera Selatan	2.900	2.925	0,86
5	Provinsi Lampung	1.000	596	(40,43)
6	Provinsi Jawa Barat	2.185	777	(64,44)
7	Provinsi Jawa Timur	50	640	1.180,00
8	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-
9	Provinsi Kalimantan Selatan	1.446	818	(43,46)
10	Provinsi Sulawesi Utara	1.374	271	(80,26)
11	Provinsi Sulawesi Tengah	1.500	2.042	36,15
12	Provinsi Sulawesi Selatan	3.280	3.121	(4,84)
13	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.425	2.731	91,65
14	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.232	1.346	9,26
15	Kabupaten Aceh Besar	2.078	887	(57,31)
16	Kabupaten Aceh Utara	1.515	1.400	(7,60)
17	Kabupaten Aceh Timur	1.750	1.297	(25,88)
18	Kabupaten Bireuen	1.830	1.091	(40,39)
19	Kabupaten Tapanuli Tengah	1.130	824	(27,15)
20	Kabupaten Asahan	335	314	(6,19)
21	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.490	944	(36,65)
22	Kabupaten Simalungun	2.000	1.770	(11,50)

No	Nama Daerah	Semula	Menjadi	%
23	Kabupaten Sijunjung	2.073	1.848	(10,85)
24	Kabupaten Pasaman	2.042	1.768	(13,43)
25	Kabupaten Limapuluh Kota	1.809	561	(69,01)
26	Kabupaten Pasaman Barat	2.200	1.325	(39,78)
27	Kabupaten Pesisir Selatan	3.351	1.851	(44,76)
28	Kabupaten Musi Rawas	1.057	1.094	3,55
29	Kabupaten Empat Lawang	966	1.343	39,02
30	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1.014	1.276	25,87
31	Kabupaten Muara Enim	2.650	2.639	(0,43)
32	Kabupaten Musi Banyuasin	1.376	466	(66,13)
33	Kabupaten Banyuasin	1.354	1.488	9,91
34	Kabupaten Lahat	1.361	1.481	8,77
35	Kabupaten Pesawaran	1.500	1.871	24,75
36	Kabupaten Tanggamus	3.699	3.509	(5,14)
37	Kabupaten Lampung Tengah	3.250	3.554	9,35
38	Kabupaten Tulang Bawang	1.400	971	(30,64)
39	Kabupaten Mesuji	894	549	(38,58)
40	Kabupaten Serang	1.447	1.512	4,45
41	Kabupaten Pandeglang	2.200	2.038	(7,38)
42	Kabupaten Garut	1.154	1.485	28,61
43	Kabupaten Indramayu	2.500	3.364	34,56
44	Kabupaten Kuningan	2.746	3.309	20,50



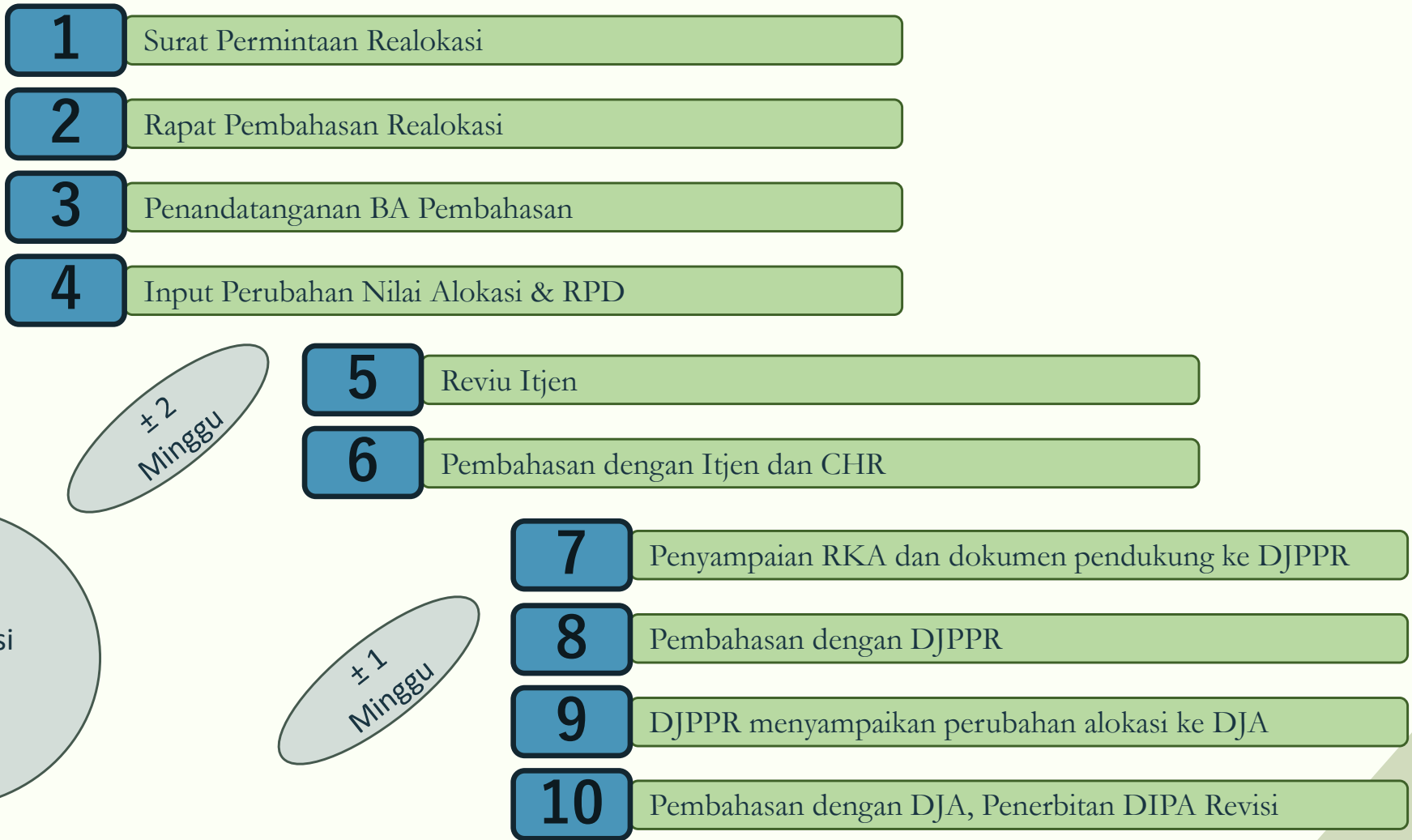
dalam juta Rupiah

No	Nama Daerah	Semula	Menjadi	%
45	Kabupaten Ciamis	2.400	2.519	4,96
46	Kabupaten Sukabumi	3.549	3.708	4,47
47	Kabupaten Majalengka	1.247	1.067	(14,44)
48	Kabupaten Sumedang	112	544	384,82
49	Kabupaten Kebumen	1.967	705	(64,18)
50	Kabupaten Banjarnegara	2.251	1.786	(20,65)
51	Kabupaten Purworejo	1.189	-	(100,00)
52	Kabupaten Pekalongan	-	-	-
53	Kabupaten Pati	3.200	2.835	(11,40)
54	Kabupaten Banyumas	1.135	1.766	55,61
55	Kabupaten Cilacap	1.948	1.694	(13,03)
56	Kabupaten Bojonegoro	-	-	-
57	Kabupaten Ngawi	2.000	1.977	(1,17)
58	Kabupaten Lamongan	2.458	1.736	(29,36)
59	Kabupaten Kediri	3.164	2.667	(15,71)
60	Kabupaten Madiun	2.262	1.923	(14,99)
61	Kabupaten Lumajang	3.000	2.172	(27,61)
62	Kabupaten Jember	1.680	1.143	(31,99)
63	Kabupaten Jombang	2.616	2.213	(15,40)
64	Kabupaten Tuban	1.426	1.436	0,68
65	Kabupaten Ketapang	2.269	1.618	(28,68)
66	Kabupaten Kubu Raya	2.172	1.248	(42,55)

No	Nama Daerah	Semula	Menjadi	%
67	Kabupaten Sambas	2.001	1.903	(4,89)
68	Kabupaten Kayong Utara	1.119	1.309	16,98
69	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1.703	1.318	(22,60)
70	Kabupaten Tapin	1.644	1.573	(4,34)
71	Kabupaten Barito Kuala	1.732	2.001	15,55
72	Kabupaten Tanah Bumbu	1.994	1.973	(1,07)
73	Kabupaten Minahasa Selatan	2.742	246	(91,02)
74	Kabupaten Bolaang Mongondow	2.175	1.994	(8,31)
75	Kabupaten Toli-Toli	2.259	841	(62,76)
76	Kabupaten Poso	2.200	2.052	(6,72)
77	Kabupaten Banggai	3.000	3.034	1,13
78	Kabupaten Wajo	1.510	1.821	20,59
79	Kabupaten Pinrang	1.195	1.658	38,76
80	Kabupaten Sidenreng Rappang	1.500	1.945	29,68
81	Kabupaten Soppeng	1.247	1.347	8,01
82	Kabupaten Bone	1.500	435	(71,00)
83	Kabupaten Lombok Tengah	1.242	1.437	15,68
84	Kabupaten Lombok Timur	3.440	1.290	(62,50)
85	Kabupaten Bima	2.637	1.742	(33,93)
86	Kabupaten Dompu	1.565	1.314	(16,05)
87	Kabupaten Manggarai Barat	1.511	1.560	3,22
88	Kabupaten Manggarai Timur	1.564	2.343	49,81
		160.810	138.545	(13,85)



Proses Revisi DIPA





Kabupaten Lombok Timur	8	VIII			269.637.000	269.637.000	LUNCURAN 2020
Kabupaten Lombok Timur	16	X	4.918.959.861	984.028.092		5.902.987.953	LUNCURAN 2020
Kabupaten Lombok Timur	17	XI	4.599.522.258	920.125.238		5.519.647.496	TA 2021
Kabupaten Lombok Timur	20	IX			169.265.400	169.265.400	TA 2021



Perkembangan IPDMIP TA 2021 s.d. Rekomendasi ke 21 (2)

ADB & AIF

Kinerja penyerapan pada 2 Prov. & 14 Kab. telah berada diatas 90%

Prov. Kalimantan Selatan	90,20%	Kab. Asahan	91,67%	Kab. Banyumas	99,98%	Kab. Poso	100,00%
Prov. Nusa Tenggara Timur	99,53%	Kab. Musi Rawas	91,82%	Kab. Cilacap	99,55%	Kab. Pinrang	99,98%
Kab. Aceh Utara	99,85%	Kab. OKU Selatan	99,25%	Kab. Jombang	98,61%	Kab. Soppeng	99,99%
Kab. Tapanuli Tengah	99,68%	Kab. Garut	96,58%	Kab. Toli-Toli	95,49%	Kab. Bone	98,89%

IFAD

Kab. Sumedang (95,21%) merupakan satu2nya daerah dengan kinerja penyerapan diatas 90%

ADB & AIF

Kinerja penyerapan pada 2 Prov. & 18 Kab. masih dibawah 10%

Prov. Sumatera Utara	0,00%	Kab. Tulang Bawang	2,21%	Kab. Banjarnegara	0,98%	Kab. Jember	1,68%
Prov. Lampung	1,00%	Kab. Mesuji	2,33%	Kab. Purworejo	3,58%	Kab. Ketapang	8,17%
Kab. Simalungun	1,41%	Kab. Indramayu	3,64%	Kab. Pekalongan	1,67%	Kab. Sambas	2,01%
Kab. Pasaman Barat	2,68%	Kab. Kuningan	4,86%	Kab. Lamongan	6,38%	Kab. Minahasa Selatan	0,00%
Kab. Lampung Tengah	7,37%	Kab. Majalengka	2,56%	Kab. Lumajang	2,96%	Kab. Bolaang Mongondow	4,65%

IFAD

Kinerja penyerapan pada 3 Prov. & 10 Kab. masih dibawah 10%

Prov. Jawa Barat	8,5%	Kab. Musi Banyuasin	5,3%	Kab. Hulu Sungai Tengah	9,0%
Prov. Jawa Timur	0,0%	Kab. Lahat	6,2%	Kab. Minahasa Selatan	9,0%
Prov. Sulawesi Utara	0,0%	Kab. Banjarnegara	2,0%	Kab. Toli-Toli	8,4%
Kab. Aceh Utara	4,1%	Kab. Purworejo	0,0%		
Kab. Bireuen	5,4%	Kab. Jember	0,0%		



% Persentase	ADB - AIF	ADB - AIF	IFAD
>75% s.d. 100%	29 Daerah Prov. Sumatera Barat, Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Sulawesi Utara, Prov. Sulawesi Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, Kab. Aceh Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Asahan,	Kab. Musi Rawas, Kab. OKU Selatan, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Serang, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Kebumen, Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Ngawi,	Kab. Madiun Kab. Jombang, Kab. Kayong Utara, Kab. Barito Kuala, Kab. Toli-Toli, Kab. Poso, Kab. Pinrang, Kab. Soppeng, Kab. Bone, Kab. Lombok Timur
>50% s.d. 75%	14 Daerah Prov. Sumatera Selatan, Kab Aceh Timur, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Pandeglang, Kab. Kediri,	Kab. Kubu Raya, Kab. Tapin, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Wajo, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Bima, Kab. Manggarai Barat	9 Daerah Prov. Sulawesi Tengah, Kab. Empat Lawang, Kab. Indramayu, Kab. Ciamis, Kab. Sukabumi, Kab. Cilacap, Kab. Kayong Utara, Kab. Barito Kuala, Kab. Lombok Tengah
<50%	43 Daerah - selain yang tertulis diatas		74 Daerah - selain yang tertulis diatas



ALOKASI & REALISASI TOTAL 2018-2021

ALOKASI 2018	REALISASI 2018	ALOKASI 2019	REALISASI 2019
107.760.000.000	29.526.539.891	252.116.867.000	180.065.950.968
ALOKASI 2020	REALISASI 2020	ALOKASI 2021	REALISASI 2021
619.820.000.000	394.129.604.073	800.000.000.000	359.612.398.084

2018 - 2021

Total Dianggarkan: Rp.1.779.696.867.000,00

Total Realisasi : Rp.963.334.493.016,00

Persen Capaian : 54,13%

	Alokasi 2018-2021	Realisasi 2018-2021	% Realisasi 2018-2021
ADB	1.204.370.326.000	687.552.742.789	57,09%
AIF	238.453.332.000	137.177.568.856	57,53%
IFAD	336.873.209.000	138.604.181.371	41,14%



SISA HIBAH IPDMIP 2018-2021

	ADB	IFAD	AIF	Total
Pagu IPDMIP (PHD)	2.322.600.000.000	464.500.000.000	538.600.000.000	3.325.700.000.000
Realisasi 2018-2021	673.504.165.386	134.367.179.017	125.578.344.899	933.449.689.302
	29,00%	28,93%	23,32%	28,07%
Sisa Pagu IPDMIP	1.649.095.834.614	330.132.820.983	413.021.655.101	2.392.250.310.698
	71,00%	71,07%	76,68%	71,93%



Daerah dengan Kinerja Realisasi Terendah

Daerah dengan Kinerja Realisasi Terbaik

ADB - AIF

IFAD

ADB - AIF

IFAD

0%

1 Daerah
Kab. Minahasa Selatan

2 Daerah
Prov. Sumatera Utara,
Kab. Pekalongan

15 Daerah
Prov. Sumatera Selatan, Prov.
Sulawesi Tengah,

>0% & ≤3%

5 Daerah
Prov. Lampung,
Kab. Indramayu,
Kab. Majalengka,
Kab. Banjarnegara,
Kab. Pekalongan

4 Daerah
Prov. Jawa Timur,
Kab. Aceh Besar,
Kab. Musi Banyuasin,
Kab. Sumedang

>50
%

Prov. Nusa Tenggara Timur,
Kab. Tapanuli Tengah,
Kab. Asahan,
Kab. Pesisir Selatan,
Kab. Empat Lawang,
Kab. OKU Selatan,
Kab. Mesuji,
Kab. Sukabumi,
Kab. Ngawi,
Kab. Madiun,
Kab. Barito Kuala,
Kab. Pinrang,
Kab. Sidenreng Rappang

9 Daerah
Prov. Sulawesi Tengah,
Kab. Musi Rawas,
Kab. Empat Lawang,
Kab. OKU Selatan,
Kab. Banyumas,
Kab. Ngawi,
Kab. Kayong Utara,
Kab. Poso,
Kab. Manggarai Timur

>3% &
≤5%

7 Daerah
Kab. Aceh Besar,
Kab. Lampung Tengah,
Kab. Tulang Bawang,
Kab. Kuningan,
Kab. Sumedang,
Kab. Purworejo,
Kab. Lumajang

2 Daerah
Prov. Lampung,
Kab. Jember



**Daerah dengan
Realisasi Total > 50%**

Nama Daerah	ADB		AIF		IFAD		Total	
Provinsi Sulawesi Tengah	28.819.447.146	69,18%	5.765.272.820	69,21%	3.136.897.475	55,92%	37.721.617.441	67,84%
Provinsi Nusa Tenggara Timur	17.356.901.904	69,90%	3.472.213.549	69,86%	605.454.400	10,99%	21.434.569.853	60,70%
Kabupaten Tapanuli Tengah	10.494.819.703	76,49%	2.099.467.712	76,62%	1.485.381.442	29,24%	14.079.668.857	65,37%
Kabupaten Asahan	7.397.984.324	85,23%	1.479.951.982	85,05%	698.650.668	36,77%	9.576.586.974	77,73%
Kabupaten Empat Lawang	14.407.431.063	70,90%	2.882.177.798	70,99%	2.257.313.573	51,42%	19.546.922.434	67,94%
Kabupaten OKU Selatan	13.570.395.801	83,92%	2.714.730.565	84,05%	1.953.482.488	54,87%	18.238.608.854	79,44%
Kabupaten Sukabumi	19.533.575.998	61,74%	3.907.652.849	61,73%	3.570.775.200	30,84%	27.012.004.047	54,51%
Kabupaten Ngawi	15.069.781.699	55,16%	3.014.679.719	55,21%	5.644.876.293	58,68%	23.729.337.711	55,97%
Kabupaten Barito Kuala	10.879.684.018	67,12%	2.176.459.050	67,17%	1.512.672.673	23,60%	14.568.815.741	56,34%
Kabupaten Pinrang	9.180.062.507	63,75%	1.836.453.161	63,77%	1.255.424.840	26,65%	12.271.940.508	55,81%
Kabupaten Sidenreng Rappang	19.857.227.153	79,05%	3.972.398.616	79,13%	2.175.725.300	40,74%	26.005.351.069	73,30%



Rekomendasi ke-1

1	Provinsi Sulawesi Selatan	XII	ADB
---	---------------------------	-----	-----

Rekomendasi ke-3

1	Kabupaten Pesawaran	VIII	ADB-AIF
2	Kabupaten Pandeglang	IV	ADB-AIF
3	Kabupaten Banjarnegara	VI	ADB-AIF
4	Kabupaten Cilacap	X	ADB-AIF
5	Kabupaten Aceh Utara	VIII	ADB-AIF
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	X	ADB-AIF
7	Kabupaten Empat Lawang	XII	ADB-AIF
8	Kabupaten Kuningan	VI	ADB-AIF
9	Kabupaten Cilacap	XI	ADB-AIF
10	Kabupaten Ngawi	VI	ADB-AIF
11	Kabupaten Ngawi	VII	ADB-AIF
12	Kabupaten Barito Kuala	XII	ADB-AIF

Rekomendasi ke-2

1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	XVI	ADB-AIF
2	Kabupaten Pasaman Barat	IX	ADB-AIF
3	Kabupaten Pesisir Selatan	X	ADB-AIF
4	Kabupaten Banyuasin	X	ADB-AIF
5	Kabupaten Banyuasin	XI	ADB-AIF
6	Kabupaten Mesuji	IX	ADB-AIF
7	Kabupaten Kuningan	V	ADB-AIF
8	Kabupaten Banyumas	XII	ADB-AIF
9	Kabupaten Banyumas	XIII	ADB-AIF
10	Kabupaten Lamongan	XV	ADB-AIF
11	Kabupaten Lamongan	XVI	ADB-AIF
12	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	XI	ADB-AIF
13	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	XII	ADB-AIF
14	Kabupaten Soppeng	VI	ADB-AIF



Rekomendasi ke-4							
1	Provinsi Lampung	VI	ADB-AIF	16	Kabupaten Madiun	VIII	ADB-AIF
2	Kabupaten Humbang Hasundutan	IX	ADB-AIF	17	Kabupaten Madiun	IX	ADB-AIF
3	Kabupaten Empat Lawang	XI	ADB-AIF	18	Kabupaten Tuban	IX	ADB-AIF
4	Kabupaten Pesawaran	IX	ADB-AIF	19	Kabupaten Kayong Utara	X	ADB-AIF
5	Kabupaten Lumajang	XII	ADB-AIF	20	Kabupaten Tapin	VII	ADB-AIF
6	Provinsi Aceh	VI	ADB-AIF	21	Kabupaten Tapin	VIII	ADB-AIF
7	Provinsi Sulawesi Selatan	XVII	ADB-AIF	22	Kabupaten Tanah Bumbu	XIV	ADB-AIF
8	Kabupaten Aceh Besar	IV	ADB-AIF	23	Kabupaten Poso	VIII	ADB-AIF
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	IX	ADB-AIF	24	Kabupaten Banggai	IX	ADB-AIF
10	Kabupaten Musi Banyuasin	III	ADB-AIF	25	Kabupaten Wajo	XII	ADB-AIF
11	Kabupaten Musi Banyuasin	IV	ADB-AIF	26	Kabupaten Wajo	XIII	ADB-AIF
12	Kabupaten Tanggamus	V	ADB-AIF	27	Kabupaten Pinrang	X	ADB-AIF
13	Kabupaten Sukabumi	XIV	ADB-AIF	28	Kabupaten Sidenreng Rappang	IX	ADB-AIF
14	Kabupaten Purworejo	XI	ADB-AIF	29	Kabupaten Lombok Tengah	XIII	ADB-AIF
15	Kabupaten Kediri	X	ADB-AIF				



Rekomendasi ke-5

1	Kabupaten Lampung Tengah	VII	ADB-AIF	12	Kabupaten Simalungun	IV	IFAD
2	Kabupaten Lampung Tengah	VIII	ADB-AIF	13	Kabupaten Pesisir Selatan	V	IFAD
3	Kabupaten Garut	X	ADB-AIF	14	Kabupaten Pesawaran	VII	IFAD
4	Provinsi Sulawesi Tengah	VI	ADB-AIF	15	Kabupaten Mesuji	IV	IFAD
5	Kabupaten Lumajang	XI	ADB-AIF	16	Kabupaten Banyumas	VII	IFAD
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	IX	ADB-AIF	17	Kabupaten Cilacap	IV	IFAD
7	Kabupaten Tapanuli Tengah	X	ADB-AIF	18	Kabupaten Kediri	IX	ADB-AIF
8	Provinsi Sumatera Barat	VI	IFAD	19	Kabupaten Lumajang	VIII	IFAD
9	Kabupaten Aceh Utara	II	IFAD	20	Kabupaten Jombang	VI	ADB-AIF
10	Kabupaten Aceh Timur	VI	IFAD	21	Kabupaten Kayong Utara	VII	IFAD
11	Kabupaten Humbang Hasundutan	IV	IFAD	22	Kabupaten Tanah Bumbu	VI	IFAD

Rekomendasi ke-6

1	Kabupaten Garut	IX	ADB-AIF	10	Kabupaten Musi Rawas	V	ADB-AIF
2	Kabupaten Ketapang	VIII	ADB-AIF	11	Kabupaten Musi Rawas	VI	ADB-AIF
3	Kabupaten Pesisir Selatan	XII	ADB-AIF	12	Kabupaten Empat Lawang	VII	IFAD
4	Kabupaten Toli-Toli	IV	ADB-AIF	13	Kabupaten Majalengka	II	IFAD
5	Kabupaten Banggai	X	ADB-AIF	14	Kabupaten Sumedang	I	IFAD
6	Kabupaten Lombok Tengah	XIV	ADB-AIF	15	Kabupaten Madiun	VII	IFAD
7	Provinsi Jawa Timur	V	ADB-AIF	16	Kabupaten Ketapang	V	IFAD
8	Kabupaten Tapanuli Tengah	V	IFAD	17	Kabupaten Kubu Raya	VII	IFAD
9	Kabupaten Pasaman	VII	IFAD	18	Kabupaten Soppeng	III	IFAD



Rekomendasi ke-7

1	Kabupaten Serang	IX	ADB-AIF	9	Kabupaten Tanah Bumbu	XV	ADB-AIF
2	Kabupaten Bireuen	X	ADB-AIF	10	Kabupaten Bolaang Mongondow	II	IFAD
3	Kabupaten Kubu Raya	XI	ADB-AIF	11	Kabupaten Banggai	V	IFAD
4	Provinsi Jawa Barat	VI	ADB-AIF	12	Kabupaten Garut	VII	IFAD
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	V	IFAD	13	Kabupaten Lamongan	IX	IFAD
6	Kabupaten Kuningan	V	IFAD	14	Kabupaten Bone	V	IFAD
7	Kabupaten Sukabumi	VI	IFAD	15	Kabupaten Lombok Tengah	V	IFAD
8	Kabupaten Barito Kuala	X	ADB-AIF				



Rekomendasi ke-8

1	Kabupaten Aceh Besar	III	ADB-AIF	16	Kabupaten Indramayu	IV	IFAD
2	Kabupaten Pandeglang	V	ADB-AIF	17	Kabupaten Ciamis	IV	ADB-AIF
3	Kabupaten Aceh Besar	I	IFAD	18	Kabupaten Pati	VII	ADB-AIF
4	Kabupaten Muara Enim	III	IFAD	19	Kabupaten Lamongan	XVII	ADB-AIF
5	Kabupaten Toli-Toli	VIII	IFAD	20	Kabupaten Jember	IV	ADB-AIF
6	Kabupaten Poso	VIII	IFAD	21	Kabupaten Sambas	V	IFAD
7	Provinsi Sumatera Selatan	VIII	ADB-AIF	22	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	IV	IFAD
8	Provinsi Jawa Barat	II	IFAD	23	Kabupaten Tapin	VII	IFAD
9	Provinsi Sulawesi Tengah	VI	IFAD	24	Kabupaten Barito Kuala	VII	IFAD
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	XVII	ADB-AIF	25	Kabupaten Sidenreng Rappang	VIII	IFAD
11	Kabupaten Sijunjung	VI	IFAD	26	Kabupaten Lombok Timur	VIII	IFAD
12	Kabupaten Banyuasin	III	IFAD	27	Kabupaten Asahan	VI	ADB-AIF
13	Kabupaten Tulang Bawang	IV	IFAD	28	Kabupaten Tuban	VIII	ADB-AIF
14	Kabupaten Serang	III	IFAD	29	Kabupaten Kayong Utara	IX	ADB-AIF
15	Kabupaten Pandeglang	V	IFAD				



Rekomendasi ke-9

1	Provinsi Sulawesi Selatan	V	IFAD
2	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	VII	ADB-AIF
3	Kabupaten Lahat	VI	IFAD
4	Kabupaten Tanggamus	VI	ADB-AIF
5	Kabupaten Pati	VII	IFAD
6	Kabupaten Ngawi	IX	IFAD
7	Kabupaten Jombang	V	IFAD
8	Kabupaten Tanah Bumbu	VII	IFAD
9	Kabupaten Dompu	V	IFAD
10	Kabupaten Ciamis	IV	IFAD

Rekomendasi ke-10

1	Kabupaten Serang	VIII	ADB-AIF
2	Provinsi Aceh	II	IFAD
3	Provinsi Nusa Tenggara Timur	III	IFAD
4	Kabupaten Pasaman	VI	ADB-AIF
5	Kabupaten Kediri	IV	IFAD
6	Kabupaten Kubu Raya	X	ADB-AIF

Rekomendasi ke-11

1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	X	ADB-AIF
2	Provinsi Sumatera Barat	XIII	ADB-AIF
3	Provinsi Sumatera Barat	XII	ADB-AIF
4	Provinsi Sumatera Selatan	IV	IFAD
5	Provinsi Kalimantan Selatan	XII	ADB-AIF
6	Kabupaten Sijunjung	VIII	ADB-AIF
7	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	VI	IFAD
8	Kabupaten Muara Enim	V	ADB-AIF
9	Kabupaten Pinrang	IV	IFAD



Rekomendasi ke-12

1	Kabupaten Ketapang	VII	ADB-AIF
2	Provinsi Sulawesi Utara	III	ADB-AIF
3	Kabupaten Bireuen	IV	IFAD
4	Kabupaten Poso	IX	ADB-AIF
5	Kabupaten Asahan	IV	IFAD
6	Kabupaten Lahat	VIII	ADB-AIF
7	Kabupaten Musi Rawas	VIII	IFAD
8	Kabupaten Tanggamus	IV	IFAD
9	Kabupaten Manggarai Timur	IX	ADB-AIF

Rekomendasi ke-13

1	Kabupaten Aceh Timur	X	ADB-AIF
2	Kabupaten Manggarai Barat	VII	ADB-AIF
3	Provinsi Lampung	III	IFAD



Rekomendasi ke-14

1	Provinsi Jawa Barat	VII	ADB-AIF	10	Kabupaten Sumedang	I	ADB-AIF
2	Provinsi Kalimantan Selatan	XIII	ADB-AIF	11	Kabupaten Kebumen	IV	IFAD
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat	XVIII	ADB-AIF	12	Kabupaten Banjarnegara	V	IFAD
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur	XI	ADB-AIF	13	Kabupaten Tuban	VIII	IFAD
5	Kabupaten Sijunjung	IX	ADB-AIF	14	Kabupaten Bolaang Mongondow	III	ADB-AIF
6	Kabupaten Pasaman Barat	VIII	IFAD	15	Kabupaten Sidenreng Rappang	X	ADB-AIF
7	Kabupaten Tulang Bawang	III	ADB-AIF	16	Kabupaten Bima	VI	ADB-AIF
8	Kabupaten Sukabumi	XV	ADB-AIF	17	Kabupaten Bima	VII	ADB-AIF
9	Kabupaten Sukabumi	XVI	ADB-AIF	18	Kabupaten Bima	IX	IFAD

Rekomendasi ke-15

1	Kabupaten Manggarai Timur	VI	IFAD	5	Kabupaten Poso	X	ADB-AIF
2	Kabupaten Tanggamus	V	IFAD	6	Kabupaten Bone	VIII	ADB-AIF
3	Kabupaten Simalungun	IX	ADB-AIF	7	Kabupaten Bima	VIII	IFAD
4	Kabupaten Sambas	XI	ADB-AIF	8	Kabupaten Dompu	V	ADB-AIF



Rekomendasi ke-16

1	Kabupaten Lahat	IX	ADB-AIF	7	Kabupaten Tanggamus	VII	ADB-AIF
2	Kabupaten Lampung Tengah	IV	IFAD	8	Kabupaten Serang	X	ADB-AIF
3	Kabupaten Pinrang	XI	ADB-AIF	9	Kabupaten Majalengka	III	ADB-AIF
4	Kabupaten Aceh Timur	XI	ADB-AIF	10	Kabupaten Purworejo	X	ADB-AIF
5	Kabupaten Aceh Timur	XII	ADB-AIF	11	Kabupaten Lombok Timur	X	ADB-AIF
6	Kabupaten Pesisir Selatan	XIII	ADB-AIF	12	Kabupaten Manggarai Timur	X	ADB-AIF

Rekomendasi ke-17

1	Kabupaten Muara Enim	VI	ADB-AIF	4	Kabupaten Pesawaran	VIII	IFAD
2	Provinsi Kalimantan Selatan	III	IFAD	5	Kabupaten Tanah Bumbu	VIII	IFAD
3	Kabupaten Aceh Utara	IX	ADB-AIF	6	Kabupaten Lombok Timur	XI	ADB-AIF



Rekomendasi ke-18

1	Provinsi Aceh	III	IFAD	10	Kabupaten Musi Banyuasin	I	IFAD
2	Provinsi Sumatera Selatan	V	IFAD	11	Kabupaten Banyuasin	IV	IFAD
3	Provinsi Sulawesi Tengah	VII	IFAD	12	Kabupaten Tanggamus	VI	IFAD
4	Provinsi Sulawesi Selatan	XIX	ADB-AIF	13	Kabupaten Mesuji	V	IFAD
5	Provinsi Nusa Tenggara Barat	XIX	ADB-AIF	14	Kabupaten Indramayu	IV	ADB-AIF
6	Kabupaten Bireuen	V	IFAD	15	Kabupaten Sumedang	II	ADB-AIF
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	VI	IFAD	16	Kabupaten Pati	VIII	ADB-AIF
8	Kabupaten Pesisir Selatan	VI	IFAD	17	Kabupaten Banggai	VI	IFAD
9	Kabupaten Musi Rawas	IX	IFAD	18	Kabupaten Wajo	VII	IFAD

Rekomendasi ke-19

1	Kabupaten Bone	X	ADB-AIF	10	Kabupaten Ciamis	V	ADB-AIF
2	Kabupaten Aceh Timur	VII	IFAD	11	Kabupaten Kebumen	V	IFAD
3	Kabupaten Sijunjung	VII	IFAD	12	Kabupaten Pekalongan	II	ADB-AIF
4	Kabupaten Pasaman	VIII	IFAD	13	Kabupaten Banyumas	VIII	IFAD
5	Kabupaten Empat Lawang	VIII	IFAD	14	Kabupaten Cilacap	V	IFAD
6	Kabupaten Muara Enim	IV	IFAD	15	Kabupaten Ngawi	X	IFAD
7	Kabupaten Pesawaran	XI	ADB-AIF	16	Kabupaten Tuban	IX	IFAD
8	Kabupaten Lampung Tengah	V	IFAD	17	Kabupaten Manggarai Barat	VII	IFAD
9	Kabupaten Tulang Bawang	V	IFAD				



2021

Rekomendasi ke-20

1	Kabupaten Bone	IX	ADB-AIF	16	Kabupaten Pati	VIII	IFAD
2	Kabupaten Tanggamus	VIII	ADB-AIF	17	Kabupaten Jombang	VI	IFAD
3	Kabupaten Kebumen	IV	ADB-AIF	18	Kabupaten Kayong Utara	VIII	IFAD
4	Kabupaten Ketapang	VI	IFAD	19	Kabupaten Tapin	VIII	IFAD
5	Kabupaten Wajo	VIII	IFAD	20	Kabupaten Barito Kuala	VIII	IFAD
6	Provinsi Sumatera Utara	I	IFAD	21	Kabupaten Minahasa Selatan	IV	IFAD
7	Provinsi Lampung	IV	IFAD	22	Kabupaten Toli-Toli	IX	IFAD
8	Provinsi Kalimantan Selatan	IV	IFAD	23	Kabupaten Poso	IX	IFAD
9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	III	IFAD	24	Kabupaten Pinrang	V	IFAD
10	Kabupaten Serang	IV	IFAD	25	Kabupaten Bone	VI	IFAD
11	Kabupaten Pandeglang	VI	IFAD	26	Kabupaten Lombok Tengah	VI	IFAD
12	Kabupaten Indramayu	V	IFAD	27	Kabupaten Lombok Timur	IX	IFAD
13	Kabupaten Kuningan	VI	IFAD	28	Kabupaten Bima	X	IFAD
14	Kabupaten Ciamis	V	IFAD	29	Kabupaten Dompu	VI	IFAD
15	Kabupaten Sukabumi	VII	IFAD	30	Kabupaten Manggarai Barat	VI	IFAD

Rekomendasi ke-21

1	Kabupaten Kubu Raya	VIII	IFAD	16	Kabupaten Kuningan	VII	IFAD
2	Provinsi Sumatera Barat	XIV	ADB-AIF	17	Kabupaten Cilacap	XII	ADB-AIF
3	Kabupaten Soppeng	IV	IFAD	18	Kabupaten Lamongan	X	IFAD
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat	XX	ADB-AIF	19	Kabupaten Madiun	XI	ADB-AIF
5	Kabupaten Aceh Besar	II	IFAD	20	Kabupaten Bolaang Mongondow	IV	IFAD



Dokumen Perlu Perbaikan

1	Kabupaten Musi Banyuasin	V	ADB-AIF	- BAP ADB AIF salah tgl DIPA
2	Kabupaten Pasaman Barat	IX	IFAD	- SPTJM salah penjabaran nilai
3	Kabupaten Garut	VIII	IFAD	- menunggu revisi DIPA
4	Kabupaten Kediri	V	IFAD	- menunggu revisi DIPA
5	Kabupaten Manggarai Timur	VII	IFAD	- menunggu revisi DIPA
6	Provinsi Sumatera Barat	XV	ADB-AIF	- menunggu revisi DIPA
7	Provinsi Jawa Barat	VIII	ADB-AIF	- menunggu revisi DIPA
8	Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV	IFAD	- BAP salah nama PPK (hal 1 & 2) - BAP salah tgl DIPA
9	Kabupaten Aceh Utara	III	IFAD	- menunggu revisi DIPA
10	Kabupaten Bireuen	XI	ADB-AIF	- BAP ADB AIF salah tgl DIPA
11	Kabupaten Bireuen	VI	IFAD	- menunggu revisi DIPA
12	Kabupaten Empat Lawang	XIII	ADB-AIF	- menunggu revisi DIPA
13	Kabupaten Banyuasin	XII	ADB-AIF	- surat kuasa asli (2021) belum ada - rek koran belum ada
14	Kabupaten Banyuasin	XIII	ADB-AIF	- menunggu revisi DIPA
15	Kabupaten Lahat	VII	IFAD	- menunggu revisi DIPA
16	Kabupaten Tanggamus	VII	IFAD	- menunggu revisi DIPA
17	Kabupaten Serang	V	IFAD	- permintaan BAP tertulis "Rp" dua kali
18	Kabupaten Pandeglang	VII	IFAD	- menunggu revisi DIPA
19	Kabupaten Sukabumi	XVII	ADB-AIF	- melebihi pagu - no SPP ADB = SPP AIF
20	Kabupaten Banjarnegara	VI	IFAD	- menunggu revisi DIPA
21	Kabupaten Purworejo	XII	ADB-AIF	- nilai ADB-AIF di laporan triwulanan tidak sesuai dengan permintaan
22	Kabupaten Lamongan	XVIII	ADB-AIF	- menunggu revisi DIPA
23	Kabupaten Lamongan	XIX	ADB-AIF	- menunggu revisi DIPA
24	Kabupaten Madiun	VIII	IFAD	- BAP salah tgl DIPA
25	Kabupaten Jombang	VIII	ADB-AIF	- BAP ADB AIF salah nilai hibah bag DIPA - melebihi pagu